



**KOLABORASI POLAIRUD POLDA KALSEL DAN TNI AL
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERORGANISIR
GUNA MEWUJUDKAN PENGAMANAN JALUR
PERAIRAN STRATEGIS ALKI II**

Takdir Mattanete¹, Priyanto², Sulistyanto³

¹²³Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstract. *Indonesia, as an archipelagic state, has full sovereignty over its maritime territory in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. As part of the implementation of UNCLOS, Indonesia has established three Archipelagic Sea Lanes (ALKI), one of which is ALKI II, connecting the Java Sea and Sulawesi Sea through the Makassar Strait. ALKI II plays a crucial role in maintaining both national and regional maritime connectivity, and it serves as a vital route for global trade. This study aims to analyze the collaboration between the Indonesian Navy (TNI AL) and the Water Police Directorate of South Kalimantan Police (Polairud Polda Kalsel) in securing ALKI II, and to identify the challenges and solutions that can enhance the effectiveness of surveillance in this maritime region. The research method used is a qualitative approach with a case study, involving secondary data analysis of patrol activities, law enforcement, and inter-agency cooperation related to the security of ALKI II. The findings indicate that, despite collaborative efforts between TNI AL and Polairud Polda Kalsel, there are gaps in coordination and limited resources that hinder the effectiveness of surveillance. Therefore, this study recommends the establishment of clear and structured Standard Operating Procedures (SOPs) to improve synergy between agencies, as well as the use of advanced technologies such as satellites and drones to enhance early detection and response to threats. Strengthening collaboration between military, police, and civilian agencies is essential to ensuring the security and maritime sovereignty of Indonesia along ALKI II.*

Keywords: Collaboration, organized crime, security, ALKI II

Abstrak . Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairannya sesuai dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Sebagai bagian dari implementasi UNCLOS, Indonesia menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), salah satunya ALKI II yang menghubungkan Laut Jawa dan Laut Sulawesi melalui Selat Makassar. ALKI II memegang peranan penting dalam menjaga konektivitas maritim nasional dan regional, serta menjadi jalur vital perdagangan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dalam pengamanan ALKI II, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan wilayah perairan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan analisis data sekunder mengenai kegiatan patroli, penegakan hukum, dan kerjasama antar instansi yang terkait dengan pengamanan ALKI II. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya kolaboratif antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel, terdapat celah dalam koordinasi dan keterbatasan sumber daya yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan sinergi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi canggih, seperti satelit dan drone, untuk meningkatkan deteksi dini dan

respons terhadap ancaman. Penguatan kolaborasi antara pihak militer, kepolisian, dan instansi sipil menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia di sepanjang ALKI II.

Kata Kunci : Kolaborasi, kejahatan, terorganisir, pengamanan, ALKI II

1. PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairannya, sebagaimana diakui dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Konvensi ini memberikan hak kepada Indonesia untuk menetapkan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya, sehingga perairan di antara pulau-pulau tersebut diakui sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia (UNCLOS, 1982). Sebagai bagian dari implementasi UNCLOS, Indonesia telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. Ketiga ALKI ini berfungsi sebagai jalur pelayaran strategis yang menjamin hak lintas damai (*innocent passage*) dan lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*) bagi kapal-kapal internasional, dengan tetap menghormati kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya (Sodik, 2011).

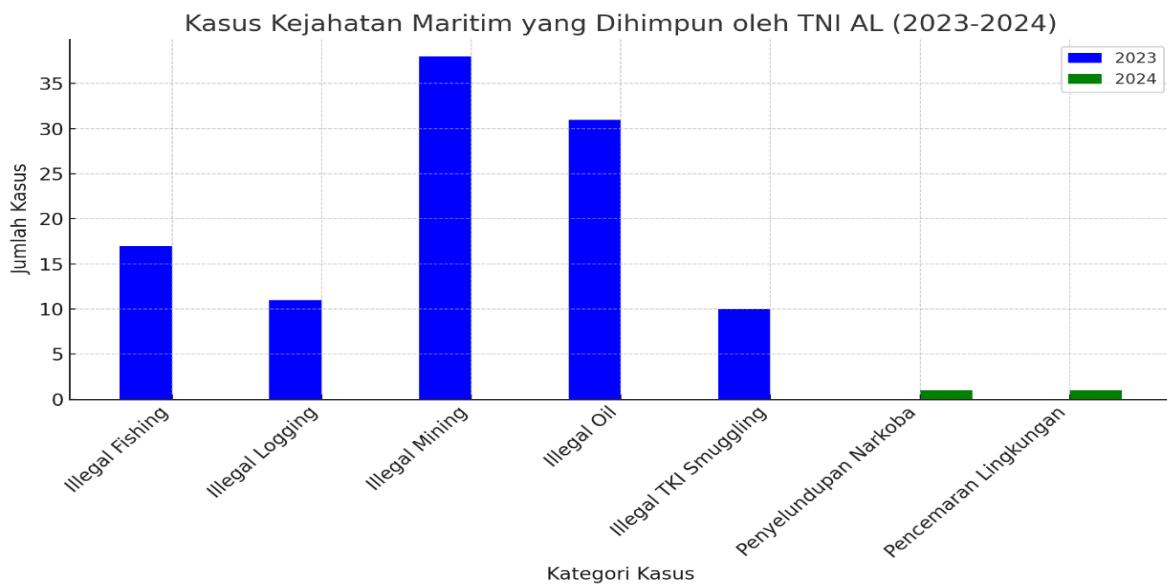
ALKI II yang membentang dari Laut Jawa ke Laut Sulawesi melalui Selat Makassar memegang peranan vital dalam sistem konektivitas maritim nasional maupun regional. Jalur ini tidak hanya menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, tetapi juga menjadi bagian penting dari arus perdagangan global yang melintasi wilayah strategis Indonesia (Kemenkominv, 2020). Untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap ALKI II, diperlukan kolaborasi yang sinergis antara berbagai pihak terkait, termasuk TNI AL dan Polairud Polda Kalsel. Kolaborasi ini harus diperkuat dengan dukungan dari instansi-instansi lain yang memiliki kewenangan di wilayah perairan tersebut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Sinergi antar instansi ini akan memastikan terlaksananya pengawasan yang optimal terhadap lalu lintas laut dan menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di sepanjang jalur ALKI, sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan maritim negara.

Kolaborasi antara Lanal Banjarmasin sebagai bagian integral dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) TNI AL dengan Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan tidak hanya memperkuat aspek penegakan hukum di wilayah perairan strategis, tetapi juga menjamin tingkat kesiapsiagaan operasional yang optimal, baik dalam dimensi laut maupun udara. Sinergi ini menjadi elemen krusial dalam mewujudkan pengamanan berlapis terhadap ALKI II, yang memiliki nilai vital bagi kelancaran logistik nasional dan jalur perdagangan internasional. Dalam konteks sistem pertahanan negara, kerja sama tersebut mencerminkan pendekatan terpadu antara unsur pertahanan dan keamanan, yang tidak hanya responsif terhadap situasi kontijensi militer, tetapi juga adaptif dalam menghadapi ancaman non-konvensional di masa damai. Berdasarkan data yang dihimpun oleh TNI AL hingga Agustus

2023, tercatat 17 kasus illegal fishing, 11 kasus illegal logging, 38 kasus illegal mining, dan 31 kasus illegal oil. Selain itu, TNI AL juga berhasil menggagalkan 10 kasus penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal sepanjang tahun 2023 (Kompas.com, 2023). Sebagai contoh, pada tahun 2024, wilayah ALKI II, yang mencakup Selat Makassar, Selat Lombok, Laut Sulawesi, dan Laut Bali, menghadapi sejumlah tantangan serius dalam hal keamanan maritim. Salah satu isu utama yang muncul adalah penyelundupan narkoba. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya jalur utama bagi penyelundupan narkoba, dengan modus operandi yang bervariasi, mulai dari kapal pesiar mewah hingga perahu tradisional.

Gambar 1. Grafik Kasus Kejahatan Maritim di ALKI II

Tahun 2023-2024



Sumber : kompas.com

Sinergi operasional Polairud dan TNI AL menjadi elemen kunci dalam menjamin supremasi keamanan perairan, terutama mengingat keterbatasan sumber daya apabila masing-masing unsur bergerak secara terpisah. Dalam konteks ini, pola kolaborasi yang telah terbentuk di wilayah Kalimantan Selatan memberikan fondasi operasional yang kuat bagi peningkatan postur pengamanan maritim. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengamanan jalur perairan ALKI II. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh TNI AL dan Polairud Polda Kalsel, masih terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Selain perompakan, kejahatan perikanan ilegal yang melibatkan kapal asing juga menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim. Oleh karena itu, pengamanan jalur perairan strategis ALKI II menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam hal kolaborasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel. Walaupun kedua instansi ini memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga



kedaulatan maritim Indonesia, terdapat gap yang signifikan dalam koordinasi yang efektif, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam menangani kejahatan terorganisir di wilayah ini. Meskipun tugas keduanya saling melengkapi, masih terdapat kekurangan dalam mekanisme koordinasi yang memadai untuk menghadapi ancaman secara terkoordinasi.

Mencermati fenomena yang terjadi, penelitian mengenai kolaborasi antara Polairud Polda Kalsel dan TNI AL dalam penanganan kejahatan terorganisir di wilayah ALKI II sangat penting, mengingat upaya untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan keamanan di perairan strategis ini. Salah satunya adalah pembentukan SOP yang dapat mengintegrasikan kolaborasi TNI AL dan Polairud Polda Kalsel, bahkan instansi sipil lainnya dan masyarakat di wilayah pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai cara-cara untuk meningkatkan efektivitas patroli, memperbaiki sistem berbagi informasi intelijen, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia antara kedua institusi. Dengan demikian, ALKI II dapat dijaga dengan lebih baik, berfungsi sebagai jalur perairan yang aman, dan mendukung kelancaran perdagangan internasional, sembari memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Penguatan kolaborasi ini tidak hanya akan berdampak positif bagi pengamanan maritim, tetapi juga akan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yang sangat bergantung pada kelancaran jalur perairan strategis ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelaah secara komprehensif efektivitas kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan Polairud Polda Kalimantan Selatan dalam penanggulangan kejahatan terorganisir di sektor strategis ALKI II. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap komandan satuan, perwira operasional, serta personel lapangan yang terlibat langsung dalam operasi pengamanan laut, diperkuat dengan observasi terhadap pola patroli gabungan dan penelaahan dokumen taktis-operasional, regulasi, serta laporan intelijen maritim. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu guna memastikan reliabilitas temuan dalam konteks operasi nyata. Analisis data menerapkan model interaktif Miles–Huberman–Saldaña (2014) yang memungkinkan identifikasi pola hambatan struktural, kesenjangan sumber daya, serta pengaruh kondisi geografis terhadap performa kolaborasi. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap kompleksitas operasi lintas matra, dinamika komando dan kendali, serta tantangan integrasi intelijen dan komunikasi yang menjadi inti permasalahan dalam pengamanan ALKI II.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk menguraikan secara kritis dinamika kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan Polairud Polda Kalimantan Selatan dalam menghadapi kejahatan terorganisir di sektor strategis ALKI II dengan menempatkan temuan



empiris sebagai dasar evaluasi terhadap kerangka teori yang digunakan. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama (kondisi struktural dan operasional, kesenjangan sumber daya, serta pengaruh karakter geografis dan spektrum ancaman) yang secara langsung menentukan efektivitas operasi gabungan di lapangan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen dianalisis untuk menilai kesesuaian antara mekanisme kolaborasi yang berlangsung dengan standar teoritik kolaborasi lintas-institusi, sekaligus mengidentifikasi titik-titik kritis yang menghambat integrasi komando, interoperabilitas komunikasi, dan sinkronisasi tindakan taktis.

Hambatan utama dalam koordinasi yang efektif antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dalam menangani kejahatan terorganisir.

Hambatan utama dalam koordinasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dalam menangani kejahatan terorganisir di ALKI II bersumber pada perbedaan kewenangan, SOP, dan sistem komunikasi antarlembaga. Ketidaksesuaian mandat berdasarkan UU No. 2/2002 (Kepolisian) dan UU No. 3/2025 (TNI) menciptakan tumpang tindih dan ketidakjelasan peran dalam operasi gabungan. TNI AL fokus pada aspek pertahanan, sementara Polairud berorientasi pada penegakan hukum sipil. Ketidaksinkronan ini menghambat respons cepat dan koordinasi operasional di lapangan.

Penelitian Fitriyanto (2022) dan Agustina (2024) menunjukkan bahwa tidak sinkronnya pembagian kewenangan dan SOP antarlembaga berdampak pada efektivitas pengamanan ALKI II. Hambatan serupa muncul akibat belum adanya SOP gabungan yang mengakomodasi karakteristik masing-masing institusi. Dalam praktik, perbedaan SOP dan sistem komunikasi memperburuk respon taktis terhadap kejahatan terorganisir. TNI AL menggunakan sistem komunikasi militer yang aman namun tidak kompatibel dengan sistem sipil milik Polairud. Kondisi ini menyebabkan lambatnya aliran informasi dan terhambatnya pengambilan keputusan cepat. Padahal, UU No. 32/2014 tentang Kelautan dan UU No. 66/2024 tentang Pelayaran menuntut koordinasi terpadu dalam pengawasan laut nasional.

Secara keseluruhan, perbaikan struktur koordinasi dan integrasi kelembagaan mutlak diperlukan guna meningkatkan efektivitas kolaborasi TNI AL dan Polairud dalam menghadapi dinamika ancaman di ALKI II :

- a. Reformulasi dan Penyelarasan Kewenangan. Perlu dilakukan penyelarasan kewenangan antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel yang selama ini tumpang tindih. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 3 Tahun 2025, masing-masing lembaga memiliki mandat berbeda: Polairud di ranah penegakan hukum sipil, TNI AL pada aspek pertahanan negara. Ketidaktegasan ini menghambat operasi gabungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan sinkron untuk mengintegrasikan kewenangan secara fungsional dan adaptif melalui keterlibatan legislatif dan institusi maritim.

-
- b. SOP Bersama yang Adaptif. SOP gabungan yang fleksibel dan responsif harus disusun untuk menyatukan langkah operasional kedua lembaga. SOP ini harus mencerminkan pembagian tanggung jawab yang jelas dan berbasis urgensi operasional, serta mampu merespons ancaman maritim yang dinamis. Referensi dari Widodo (2016) menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan prosedur agar respons operasional lebih efisien dan minim konflik kewenangan.
 - c. Sistem Komunikasi Terpadu. Perbedaan sistem komunikasi menjadi penghambat koordinasi. Untuk itu, pengembangan sistem komunikasi yang kompatibel dan *real-time*, seperti teknologi satelit dan radar terintegrasi, sangat diperlukan. Komunikasi yang andal akan meningkatkan kecepatan dan akurasi respons dalam operasi gabungan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
 - d. Pelatihan Gabungan Personel. Peningkatan kapasitas personel harus dilakukan melalui pelatihan lintas lembaga yang terstruktur dan realistik. Pelatihan ini mencakup kemampuan teknis, taktis, dan koordinatif berdasarkan teori Mintzberg (1993), sehingga kedua lembaga mampu bertindak sinergis dan adaptif dalam kondisi darurat dan ancaman kompleks.
 - e. Teknologi Pemantauan Terintegrasi. Pengawasan ALKI II perlu didukung oleh teknologi seperti radar maritim, sistem satelit, dan AIS. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan deteksi dini, monitoring real-time, dan respons cepat terhadap aktivitas ilegal, sebagaimana ditekankan dalam UU No. 66 Tahun 2024. Sistem ini akan memperkuat efektivitas pengawasan dibanding metode manual yang terbatas.
 - f. Sinergi Lintas Lembaga. Pengamanan ALKI II memerlukan koordinasi antarlembaga secara sistemik, terutama antara TNI AL, Polairud, Bakamla, dan kementerian teknis. Sinergi ini menuntut kesepakatan peran, alur komunikasi yang terbuka, dan prosedur bersama. Merujuk teori koordinasi Widodo (2016) dan Mintzberg (1993), mekanisme seperti *direct supervision* dan *mutual adjustment* perlu diformalkan melalui kebijakan dan SOP yang terintegrasi.
 - g. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan terhadap Pengawasan Maritim. Solusi terakhir adalah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas pengawasan yang diterapkan. Hal ini mencakup penilaian terhadap kinerja operasional, pemanfaatan teknologi, serta kepatuhan terhadap SOP yang telah disepakati. Proses evaluasi ini harus terus menerus dilakukan untuk memperbaiki dan memperbarui sistem yang ada agar tetap efektif dalam menghadapi ancaman yang selalu berkembang di ALKI II.

Sumber daya yang mendukung kolaborasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel, khususnya dalam hal anggaran, sarana dan prasarana komunikasi, serta kapal patroli.



Koordinasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dalam menangani kejahatan terorganisir di ALKI II menghadapi hambatan struktural, terutama akibat perbedaan kewenangan yang diatur dalam UU No. 2/2002 (Kepolisian) dan UU No. 3/2025 (TNI). Polairud berwenang dalam penegakan hukum sipil, sedangkan TNI AL berfokus pada pertahanan maritim. Ketidaksesuaian mandat ini menimbulkan tumpang tindih fungsi di lapangan, sebagaimana ditegaskan oleh Putra (2024), yang menilai ketidakjelasan otoritas menghambat respons cepat dan pengambilan keputusan.

Agustina (2024) juga mencatat bahwa pelaksanaan OMSP oleh TNI AL sering kali terbentur ambiguitas peran antarlembaga, yang memperlambat operasi gabungan. Pembaruan regulasi dan penyusunan aturan teknis yang menyatukan kewenangan diperlukan untuk memastikan integrasi fungsi antarinstansi. Perbedaan prosedur operasional antara TNI AL dan Polairud, sebagaimana disorot dalam UU No. 66/2024, juga memengaruhi efektivitas operasi. SOP TNI AL yang hierarkis sering kali tidak selaras dengan pendekatan Polairud yang lebih fleksibel. Fitriyanto (2022) menggarisbawahi perlunya SOP gabungan untuk menyelaraskan respons terhadap ancaman seperti penyelundupan dan perompakan.

Berikut adalah beberapa solusi yang lebih berfokus pada pendekatan struktural, teknologi, dan kerja sama lintas sektor yang belum dibahas sebelumnya.

a. Pembuatan Lembaga Koordinasi Pengamanan Maritim Terpadu. Salah satu solusi strategis adalah pembentukan lembaga koordinasi pengamanan maritim yang secara khusus mengintegrasikan tugas TNI AL, Polairud Polda Kalsel, dan instansi terkait. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat komando untuk pengawasan dan koordinasi operasional di ALKI II, sesuai dengan teori kolaborasi Barbara Gray (1998) yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan struktur koordinasi yang jelas. Lembaga ini perlu dilengkapi regulasi tegas terkait pembagian tugas, kewenangan, serta mekanisme komunikasi dan evaluasi kinerja. Sebagai dasar hukum, pembentukan lembaga ini dapat merujuk pada UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, guna memperkuat otoritas dalam pengelolaan dan pengawasan laut.

b. Implementasi Sistem Berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) untuk Pemantauan Maritim. Solusi teknologi yang lebih maju adalah dengan mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk menganalisis data maritim secara *real-time*. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kapal yang melintas di ALKI II dengan lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan AI dalam pemantauan dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dari kapal-kapal yang melintas, misalnya mengidentifikasi pola yang tidak biasa, seperti kecepatan yang tidak sesuai atau pergerakan kapal yang mencurigakan. Hal ini akan

memungkinkan TNI AL dan Polairud Polda Kalsel untuk merespons ancaman lebih awal sebelum ancaman tersebut berkembang menjadi lebih besar

c. Penciptaan Platform Berbagi Data Maritim Terintegrasi. Salah satu solusi penting lainnya adalah pengembangan dan penerapan platform berbagi data maritim terintegrasi, yang menghubungkan TNI AL, Polairud Polda Kalsel, dan lembaga terkait lainnya, seperti Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Platform ini dapat berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan data terkait ancaman maritim, seperti informasi tentang kapal yang melintas, aktivitas penyelundupan, serta kegiatan ilegal lainnya. Dengan adanya platform berbagi data yang terintegrasi, informasi yang penting dapat diakses oleh semua lembaga terkait secara cepat dan efektif, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Platform berbasis cloud ini dapat diakses oleh lembaga yang terlibat dalam pengamanan dengan otorisasi yang sesuai, memastikan bahwa informasi yang dibagikan tetap aman namun tetap dapat diakses dengan cepat. Dengan menggunakan pendekatan ini, aliran data akan menjadi lebih transparan, dan semua lembaga dapat bergerak dengan lebih cepat berdasarkan data yang akurat dan terkini. Hal ini sesuai dengan teori koordinasi Mintzberg (1993), yang menggarisbawahi pentingnya aliran informasi yang efektif dalam mencapai koordinasi antar lembaga. Selain itu, sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem pemantauan lainnya yang sudah ada, seperti radar dan teknologi pemantauan satelit.

d. Penguatan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Internasional. Solusi lain yang cukup penting adalah penguatan kolaborasi antara TNI AL, Polairud Polda Kalsel, dan sektor swasta, serta lembaga internasional. Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan maritim, dapat memberikan kontribusi besar dalam pengadaan alat dan teknologi canggih untuk pengamanan maritim, termasuk perangkat pemantauan dan sistem komunikasi yang lebih baik. Kerja sama dengan lembaga internasional, seperti International Maritime Organization (IMO), juga sangat penting untuk memperkuat pengawasan perairan dan berbagi informasi terkait ancaman maritim global. Herlambang Suryo Putro (2022) dalam penelitiannya mengenai peran TNI AL dalam pertahanan dan keamanan laut mengungkapkan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan untuk menjaga keamanan maritim, terutama dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, memperkuat kerja sama dengan lembaga internasional dalam hal pelatihan, berbagi informasi intelijen, serta pengembangan sistem pengamanan maritim yang terkoordinasi akan sangat mendukung upaya pengamanan ALKI II.

e. Inovasi Kebijakan Sumber Daya Manusia Melalui Kolaborasi Antar Lembaga. Solusi berikutnya adalah inovasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang terlatih di kedua lembaga. Menurut teori kolaborasi Gray (1998), kolaborasi yang

sukses tidak hanya bergantung pada pembagian sumber daya, tetapi juga pada pembangunan kapabilitas lembaga dan individu yang terlibat. Oleh karena itu, pengembangan program pelatihan bersama yang lebih intensif, berbasis pada skenario nyata dan peningkatan kapasitas teknis serta non-teknis, menjadi sangat penting. Melalui pendekatan ini, personel TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam pengawasan maritim, penanggulangan kejahatan terorganisir, serta penerapan teknologi pemantauan.

f. Penggunaan Sistem Manajemen Terintegrasi untuk Kolaborasi Operasional. Sebagai langkah operasional yang lebih realistik, pengembangan sistem manajemen terintegrasi yang khusus dirancang untuk operasi gabungan antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dapat menjadi solusi efektif. Sistem ini akan memungkinkan kedua lembaga untuk berbagi informasi secara real-time, memonitor jalur pelayaran, dan mengkoordinasikan operasi secara langsung melalui platform digital yang dapat mengakses data dari berbagai sumber, seperti radar, satelit, dan sistem pemantauan kapal (AIS). Sistem manajemen ini juga harus dilengkapi dengan antarmuka yang ramah pengguna, yang memungkinkan petugas di lapangan untuk mengakses data yang diperlukan secara cepat dan mudah.

g. Operasionalisasi Pengadaan Kapal Patroli Bersama. Untuk memastikan pengawasan yang lebih maksimal di perairan ALKI II, pengadaan kapal patroli bersama yang dapat digunakan secara lintas lembaga harus menjadi prioritas. Pengadaan ini dapat dilakukan dengan pendekatan berbagi anggaran, di mana TNI AL dan Polairud Polda Kalsel bersama-sama mengalokasikan anggaran untuk pembelian kapal patroli baru yang lebih canggih dan dapat memenuhi kebutuhan pengamanan di wilayah perairan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Kapal-kapal ini harus dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar, sistem AIS, dan teknologi pemantauan satelit untuk meningkatkan kapasitas deteksi ancaman.

h. Penerapan Sistem Pengawasan 24/7 (24 jam, 7 hari) secara berkesinambungan dan Respons Cepat. Untuk menghadapi kejahatan terorganisir yang semakin kompleks dan dinamis, penerapan sistem pengawasan maritim yang beroperasi 24/7 dengan respons cepat harus menjadi prioritas. Pengawasan ini tidak hanya melibatkan patroli laut, tetapi juga penggunaan teknologi pemantauan jarak jauh yang dapat mendeteksi kapal yang mencurigakan, serta menggunakan teknologi seperti drone untuk memantau area-area yang sulit dijangkau oleh kapal patroli. Dalam hal ini, peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menekankan pengelolaan pelayaran yang terintegrasi dan pemantauan berbasis teknologi, harus diimplementasikan secara operasional dengan cara yang lebih dinamis. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi ini harus disertai dengan prosedur yang



memungkinkan respons yang cepat terhadap ancaman yang terdeteksi, seperti pengiriman tim dari Polairud atau TNI AL dalam waktu singkat ke lokasi ancaman.

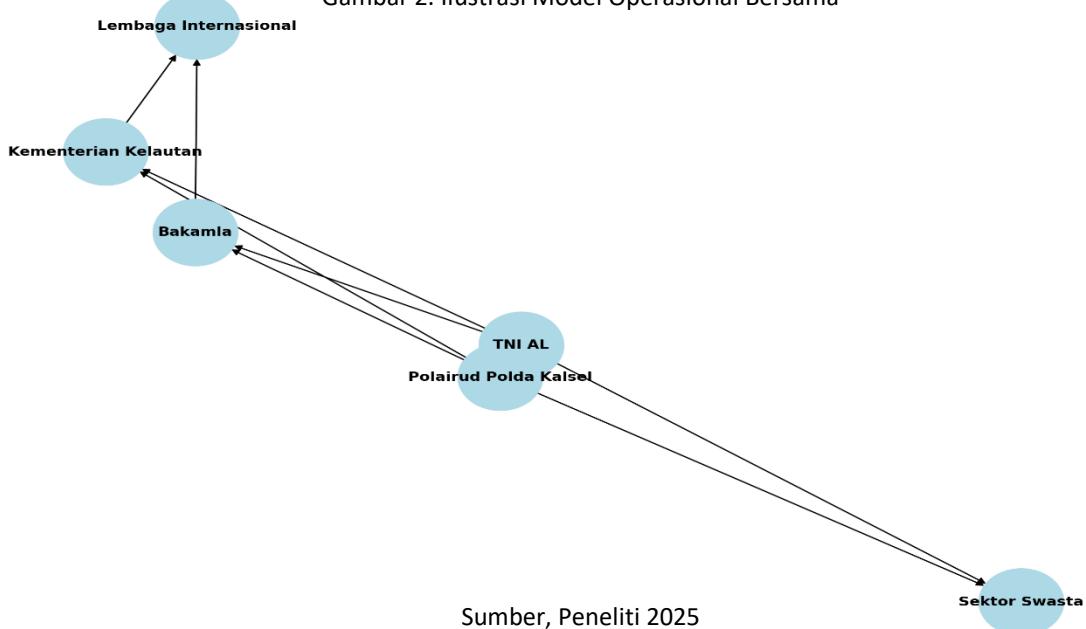
Kondisi geografis dan keanekaragaman ancaman yang dihadapi di ALKI II.

Keamanan ALKI II menghadapi tantangan kompleks akibat letaknya yang strategis dan tingginya intensitas ancaman maritim, seperti perompakan, penyelundupan, dan IUUF. Wilayah ini, yang menghubungkan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, memiliki lalu lintas kapal padat serta kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti selat sempit dan pulau kecil, sehingga memerlukan respons cepat dan terkoordinasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel. UU No. 2/2002 tentang Polri memberikan kewenangan penegakan hukum sipil kepada Polairud, sedangkan UU No. 3/2025 tentang TNI menugaskan TNI AL dalam konteks pertahanan maritim. Ketidaksesuaian mandat ini menciptakan tumpang tindih kewenangan, menghambat koordinasi dan memperlambat respons terhadap ancaman. Perbedaan SOP juga memperburuk sinergi operasional; TNI AL cenderung kaku dan hierarkis, sementara Polairud lebih adaptif, sebagaimana disorot oleh Agustina (2024). Sesuai amanat UU No. 66/2024 dan UU No. 32/2014, pengawasan pelayaran seharusnya terintegrasi, namun perbedaan sistem komunikasi antara TNI AL (militer) dan Polairud (sipil) menghambat pertukaran informasi dan pengambilan keputusan. Menurut Manullang (2001), pengawasan efektif memerlukan aliran informasi yang cepat dan akurat, yang belum tercapai tanpa interoperabilitas sistem komunikasi.

Oleh karena itu, mengintegrasikan teknologi dalam pengawasan, memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan lintas negara, serta menyusun kebijakan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan sumber daya manusia dan material adalah langkah-langkah yang dapat memperkuat efektivitas pengamanan di ALKI II, serta mendukung ketahanan maritim Indonesia dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, antara lain :

- a. Penerapan Model Operasional Bersama (*Joint Operations Model*). Mengingat kompleksitas tugas yang harus dilakukan oleh TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dalam mengatasi ancaman yang ada di ALKI II, penerapan model operasional bersama yang mengintegrasikan kedua lembaga secara lebih terstruktur dapat menjadi solusi efektif. Model ini mengacu pada teori kolaborasi dan integrasi antar lembaga yang dijelaskan oleh Gray (1998), di mana pengorganisasian tugas harus didasarkan pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, sistem manajerial berbasis kolaborasi lintas sektor dan lembaga dapat memperkuat aliran informasi, pembagian tugas yang lebih jelas, dan respons yang lebih cepat terhadap ancaman yang muncul. Secara operasional, model ini dapat berupa pembentukan unit gabungan yang terdiri dari personel TNI AL dan Polairud Polda Kalsel yang memiliki tugas spesifik sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, namun tetap dalam satu komando bersama. Hal ini akan menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi darurat.

Gambar 2. Ilustrasi Model Operasional Bersama



Sumber, Peneliti 2025

Keterangan :

Dalam model ini, beberapa lembaga terkait bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengamanan. TNI AL dan Polairud Polda Kalsel saling terhubung dengan Bakamla dan Kementerian Kelautan untuk memastikan pengelolaan yang lebih terkoordinasi. Selain itu, sektor swasta juga berperan penting dalam menyediakan teknologi dan dukungan operasional, serta lembaga internasional yang turut serta dalam kerjasama lintas negara.

b. Integrasi Teknologi Pemantauan Canggih dan Sistem Komunikasi *Real-Time*. Salah satu hambatan utama yang dihadapi dalam pengamanan ALKI II adalah ketidakmampuan untuk memantau wilayah perairan yang sangat luas dan sulit dijangkau secara efektif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sistem pemantauan yang terintegrasi sangat penting untuk pengelolaan kelautan yang efektif. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan dan penerapan teknologi pemantauan yang canggih dan lebih efisien, seperti penggunaan radar jarak jauh, teknologi drone laut (UAV), serta sistem komunikasi berbasis satelit yang memungkinkan kedua lembaga untuk berkoordinasi secara *real-time*. Berdasarkan teori pengawasan yang dijelaskan oleh Manullang (2001), untuk menjamin pengawasan yang optimal, informasi yang tepat dan *real-time* harus segera disampaikan ke pusat komando.

-
- c. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan Antar Lembaga. Dalam rangka mengatasi tantangan kewenangan yang tidak terkoordinasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penguatan peraturan yang mengatur pembagian kewenangan di sektor kelautan dan pengawasan maritim. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran perlu diimplementasikan secara lebih konsisten, dengan memperjelas tugas dan kewenangan setiap lembaga yang terlibat dalam pengawasan perairan. Mengacu pada teori koordinasi Mintzberg (1993), *standardization of work processes* dapat diterapkan untuk menciptakan prosedur operasional yang lebih baku dan jelas antar lembaga, sehingga mengurangi ketidakseimbangan dalam pengelolaan tugas.
- d. Desentralisasi Pengambilan Keputusan di Tingkat Lapangan. Untuk memastikan efektivitas respons terhadap dinamika ancaman maritim yang bersifat cepat, mendadak, dan tidak terduga, penerapan desentralisasi dalam pengambilan keputusan operasional menjadi sebuah kebutuhan strategis. Desentralisasi ini memungkinkan unit-unit taktis di lapangan, baik dari unsur TNI AL maupun Polairud Polda Kalsel, untuk bertindak secara mandiri dalam kerangka kewenangan yang telah didelegasikan secara proporsional. Konsep ini sejalan dengan prinsip mutual adjustment dalam teori organisasi Mintzberg (1993), yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan melalui koordinasi informal dan adaptasi antar unit kerja tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur komando terpusat. Dalam konteks pengamanan perairan strategis seperti ALKI II, pengambilan keputusan yang cepat di lapangan menjadi sangat krusial, mengingat ancaman seperti perompakan, penyelundupan narkotika, atau *illegal fishing* sering kali berlangsung dalam waktu singkat dan pada lokasi yang sulit dijangkau oleh pusat komando.
- e. Kolaborasi Lintas Sektor dan Peningkatan Partisipasi Swasta. Sebagai langkah strategis tambahan dalam memperkuat sistem pengamanan maritim nasional, diperlukan perluasan pendekatan kolaboratif yang mencakup keterlibatan lintas sektor, khususnya dengan sektor swasta. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi elemen penting dalam menciptakan sinergi sumber daya, teknologi, dan pembiayaan yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh negara. Perusahaan-perusahaan di bidang teknologi informasi, sistem keamanan digital, transportasi laut, serta industri pertahanan dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan sistem pemantauan maritim berbasis kecerdasan buatan, pemrosesan data spasial, dan integrasi radar laut yang real-time. Partisipasi sektor swasta juga sangat potensial dalam skema pembiayaan publik-swasta (*public-private partnership/PPP*), misalnya melalui penyediaan kapal patroli generasi baru yang dilengkapi perangkat pengawasan canggih seperti drone laut, sensor termal, dan sistem AIS otomatis.

Mengacu pada teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Barbara Gray (1998), sinergi lintas sektor akan memperkuat kapasitas kelembagaan dengan menciptakan struktur koordinatif yang fleksibel dan saling melengkapi. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya ekosistem keamanan maritim yang lebih adaptif terhadap perubahan ancaman dan lebih tanggap terhadap kebutuhan operasional di lapangan. Selain dari sisi sumber daya dan teknologi, sektor swasta juga berperan penting dalam akselerasi inovasi dan pemanfaatan teknologi *dual-use*, yang awalnya dikembangkan untuk keperluan sipil tetapi dapat diadaptasi untuk pertahanan maritim.

f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Bersama. Salah satu solusi strategis yang esensial dalam memperkuat efektivitas pengamanan maritim di wilayah ALKI II adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan terpadu lintas lembaga antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teknis dan taktis, melainkan harus dirancang dalam kerangka sistem pembinaan operasional berbasis simulasi ancaman nyata (*real threat scenario-based training*), seperti penyelundupan lintas negara, perompakan bersenjata, serta pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Model pelatihan ini bertujuan menciptakan *interoperability* antarpersonel serta mendorong standardisasi tindakan di lapangan yang adaptif terhadap situasi berisiko tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, seluruh temuan lapangan, wawancara mendalam, dan analisis teori menunjukkan bahwa kolaborasi antara TNI AL dan Polairud Polda Kalsel dalam pengamanan ALKI II sangat ditentukan oleh faktor struktural, sumber daya, dan karakteristik ancaman maritim yang semakin kompleks. Kesimpulan berikut disusun untuk menjawab langsung ketiga rumusan masalah penelitian.

a. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi kedua institusi masih belum terbangun secara sistemik karena absennya SOP gabungan, belum adanya mekanisme komando terpadu, serta perbedaan kultur organisasi antara struktur militer TNI AL dan struktur kepolisian pada Polairud. Pertukaran data intelijen dan komunikasi operasional juga belum berjalan *real-time* akibat keterbatasan interoperabilitas sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan respons operasional sering terlambat, tindakan di lapangan tidak sinkron, dan operasi gabungan cenderung bersifat reaktif daripada proaktif. Secara keseluruhan, kolaborasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum mencerminkan pola *interagency operation* yang terintegrasi penuh.

b. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan yang secara langsung menurunkan efektivitas operasi gabungan. Anggaran kedua lembaga masih disusun sektoral sehingga kegiatan kolaboratif tidak memiliki dukungan finansial



bersama (*joint funding*). Armada patroli yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah operasi ALKI II dan sebagian telah melewati usia teknis optimal. Sistem komunikasi kedua institusi tidak kompatibel, menghambat koordinasi cepat dalam operasi. Selain itu, pelatihan terpadu lintas lembaga masih minim, menyebabkan perbedaan pemahaman prosedur, gaya komando, serta kemampuan taktis dalam menjalankan operasi gabungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi menuntut modernisasi aset, integrasi teknologi, serta peningkatan kapasitas personel secara berkelanjutan.

c. ALKI II memiliki karakter geografis dan operasional yang sangat menantang, yakni jalur pelayaran internasional yang padat, banyak area *blank-spot* radar, serta titik-titik rawan yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir. Ancaman yang muncul (mulai dari penyelundupan narkotika, IUU fishing, perdagangan manusia, hingga perompakan bersenjata) bersifat lintas batas, adaptif, dan terstruktur. Kompleksitas tersebut diperparah oleh belum optimalnya integrasi sistem pengawasan maritim nasional. Dengan struktur ancaman yang demikian, penguatan kolaborasi TNI AL dan Polairud Polda Kalsel tidak dapat hanya bersandar pada operasi rutin, tetapi membutuhkan reformasi sistemik yang mencakup integrasi teknologi pemantauan modern, pembentukan pusat komando bersama, serta kerangka kebijakan lintas sektor yang lebih kuat untuk menghadapi dinamika ancaman di ALKI II secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control Systems*. 12th Edition. McGraw-Hill Education
- Agus Fitriyanto, 2022. kerjasama pengamanan ALKI II (Studi Kasus Sinergi Bakamla, TNI dan Polairud). Jurnal Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad)
- Alam, S., Sutanto, R., & Purwanto, S. (2025). Analisis Efektifitas Kerjasama TNI-Polri untuk Menangani Destructive Fishing Guna Mendukung Ekonomi Biru dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(11), 4833-4845.
- Baiq, N. A. (2023). Peran dan Strategi TNI AL dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Jurnal Universitas Mataram.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA.



Buzan, B., & Lene, H., (2009). *The Evolution Of International Security*. Newyork:Cambridge University Press

Buzan, B. (2007). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (2nd ed.). ECPR Press

Emirbayer, M., & Goodwin, J. (1994). *Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency*. American Journal of Sociology, 99(6),

Gray, Barbara, *Collaborating: Finding Common Ground For multiparty Problems*. San Francisco, CA:Jossey-Bass. H 1989

Henri Fayol. (1949). *General and Industrial Management*. Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd.

Husein Umar, *Strategic Manaagement in Action* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2001)

Herlambang Suryo Putro, 2022, Peran TNI AL dalam pertahanan, keamanan, penegakkan hukum keselamatan di laut guna mendukung perpindahan IKN dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, Jurnal Seskoal

Hendriman Putra, 2024. Peran TNI AL dalam Perkuatan Ketahanan Maritim Indonesia : Pengamanan IKN dari Ancaman di ALKI II, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP).

Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons? Public Administration*, 69(1),

Lemhannas, 2025. Materi Wawasan Nusantara

Lemhannas, 2025. Materi Ketahanan Nasional

Lin, N. (2001). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge University Press

Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History, 1660–1783*. Boston: Little, Brown and Company.

Mary Parker Follett. (1926). *The Giving of Orders. In Papers on the Science of Administration*, edited by L. Gulick and L. Urwick, reprinted from original publication.

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2017). *Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation, and Incentives*. 4th Edition. Pearson.

Michael E. Porter, Strategi Bersaing (*Competitive Strategy*), terj. Suryanto Sigit (Tangerang: Kharisma Publishing Group, 2007),

Morgan, G. (2006). *Images of Organization*. Updated Edition. SAGE Publications

Natsir, M. (2016). Wawasan Nusantara: Sebuah Kajian Teoretis tentang Pembangunan Nasional Indonesia. Jakarta: Penerbit Widina.

OECD. (2016). *The Ocean Economy in 2030*. OECD Publishing, Paris.



Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., Hariputra, A., ... & Arianto, T. (2024). *Manajemen sumber daya manusia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Purwanto, S., Ardiansyah, M., Januru, L., Anami, Z., Putri, N. A. S. M., & Gunadi, I. & Hastriana, US (2025). *Pengembangan Karier dan Kompetensi SDM*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Purwanto, S., & Siagian, F. (2025). Strategic human resources management in the global era: Navigating opportunities and challenges. *Centurion MSPD Journal*, 1(1).

Rangkuti, 2018. Metode Penelitian Sosial, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Sam Bateman. (2007). *Maritime Security: Towards a Shared Understanding and Cooperative Mechanism in Southeast Asia*. Dalam Kwa, C. G., & Skogan, J. K. (Eds.), Maritime Security in Southeast Asia

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta

Walt, S. M. (1991). *The Renaissance of Security Studies*. International Studies Quarterly, 35(2),

Widodo, A. (2016). Manajemen Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah: Teori dan Praktik. Jurnal Administrasi Negara, 28(2)